

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering di alami perempuan Mesir, diruang privat ataupun diruang publik. UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki kepedulian tentang permasalahan perempuan mendukung negara-negara anggota UN termasuk Mesir, dalam menetapkan dan memantau kesetaraan gender dengan kerjasama antar mitranya untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Mesir. UN Women sebagai organisasi internasional berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan Mesir.

Dalam perannya sebagai arena atau forum, UN Women melakukan berbagai programnya sebagai tindakan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Program tersebut seperti; program *Safe Cities, Prevention and access to essential services to end violence against women and girls, Eliminating female genital mutilation (FGM) program, Confronting pandemic-related violence against women, Women's access to justice, Tackling violence against women in the time of COVID-19*. Kampanye melalui media online yaitu Youtube juga dilakukan seperti *Speak Up, Women's hosting and guidance shelters, I chose to Speak up, #SpeakUp Campaign 2 End VAW:Domestic Violence* dan *#SpeakUp Campaign to End VAW: Sexual Harassment*.

UN Women juga melakukan studi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat perempuan merasa aman dan tidak aman di ranah publik. Berdasarkan hasil tersebut, dikembangkan intervensi untuk meningkatkan rasa aman perempuan dan penggunaan ruang publik melalui perbaikan berbagai elemen lingkungan binaan dan perubahan perilaku masyarakat. UN Women juga memberikan dukungan kepada anggota-anggota Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat kapasitas tanggapan penuntutan yang efektif mengenai kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan dukungan dan perlindungan bagi para penyintas.

Dalam peran dan upaya yang telah dilakukan UN Women menemukan berbagai hambatan yang di hadapi dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir berdasarkan dari teori feminisme radikal dan feminisme liberal. Feminisme radikal mengidentifikasi dominasi laki-laki, atau patriarki, sebagai akar dari ketidaksetaraan gender. Feminisme Liberal, berfokus pada peran kesetaraan, kesempatan, khususnya kesetaraan gender, serta dampak peran gender pada kesetaraan sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Patriarki dan budaya impunitas di masyarakat Mesir menjadi hambatan pertama yang dihadapi UN Women Tubuh perempuan sebagai objek utama penyiksaan oleh kekuasaan laki-laki, seperti kekerasan terhadap perempuan. Akar dari kekerasan terhadap perempuan terletak pada hubungan kekuasaan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan serta diskriminasi yang terjadi baik di ruang publik maupun pribadi. Norma dan budaya gender sering digunakan sebagai pembenaran kekerasan terhadap perempuan yang dipandang sebagai hak suami untuk membenarkan “pendisiplinan” kepada istri yang membantah. Hambatan yang kedua yaitu ketidakpastian ekonomi dan rendahnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dengan presentase yang cukup jauh antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya hambatan yang ketiga yaitu masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen Mesir yang dapat berdampak pada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi perempuan apabila tidak adanya partisipasi perempuan yang menyuarakan permasalahan perempuan di dalam pemerintahan.

Berdasarkan dari penjelasan kedua teori diatas dan keadaan yang terjadi di Mesir dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana upaya UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan Mesir pasca Arab Spring (2017 – 2021), dan apa saja hambatan yang dihadapi UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan Mesir. Hal ini mengapa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Mesir, perlu adanya pembenahan yang bertahap dalam segala bidang seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Mesir.